

NASKAH AKHIR

(17-06-2010)

Jam 19.30



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2009-2010**

JUMAT, 18 JUNI 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2010**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2009-2010**

JUMAT, 18 JUNI 2010

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,

Hari ini, 18 Juni 2010, Dewan akan menutup Masa Sidang III Tahun Sidang 2009–2010 yang telah berlangsung sejak tanggal 5 April 2010. Masa Sidang III terdiri dari 55 hari kerja dari 75 hari kalender, telah diisi dengan kegiatan yang efektif oleh Dewan dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya DPR akan memasuki masa reses, dimulai pada tanggal 19 Juni sampai dengan 11 Juli 2010.

Sidang Dewan yang terhormat,

UUD 1945 mengamanatkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi perundang-undangan/legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam 8 (delapan) bulan sejak DPR hasil Pemilu 2009 terbentuk, dinamika politik yang berkembang demikian tinggi, berdampak fungsi pengawasan Dewan mendapatkan porsi besar di dalam agenda kegiatan Dewan. Sementara itu, 2 (dua) fungsi yang lain, khususnya fungsi perundang-undangan pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan.

Perubahan pertama UUD 1945 Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*. Ini artinya, dengan perubahan UUD 1945 tersebut, telah mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan membentuk UU.

DPR telah membentuk alat kelengkapan tetap yaitu Badan Legislasi. Badan ini memiliki banyak tugas, di antaranya menyusun Prolegnas untuk masa keanggotaan DPR, serta menyiapkan RUU berdasarkan prioritas tahunan, melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep RUU yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan Komisi atau DPD. Untuk kurun waktu 2010-2014, melalui PROLEGNAS telah ditetapkan 248 (dua ratus empat puluh delapan) RUU yang akan diselesaikan, 70 (tujuh puluh) di antaranya menjadi prioritas tahun 2010.

Sampai dengan penutupan Masa Sidang III ini, DPR baru dapat menyelesaikan 5 (lima) RUU, satu di antaranya ditolak, yaitu RUU tentang PERPPU No. 4 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Empat RUU yang sudah mendapatkan persetujuan untuk disahkan menjadi UU yaitu RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2008, RUU Pencabutan PERPPU No. 4 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU APBN-P 2010, dan RUU Ratifikasi Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura 2009.

RUU yang sedang dalam persiapan dan pembahasan tahun ini ada 36 (tigapuluh enam) dari usul inisiatif DPR, dan 34 (tiga puluh empat) RUU usul Pemerintah.

Dari 36 (tiga puluh enam) usul DPR, dengan perincian:

- 2 (Dua) RUU masuk dalam Pembicaraan Tingkat 1;
- 5 (Lima) RUU telah disampaikan kepada Presiden, menunggu penunjukan menteri yang akan mem bahas nya bersama DPR;
- 4 (Empat) RUU sedang dalam pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi;
- 18 (Delapan belas) RUU sedang menunggu pembahasan di Baleg;
- 7 (Tujuh) RUU sedang dalam proses penyiapan draf RUU dan Naskah Akademik.

Adapun 34 (Tiga Puluh Empat) RUU usul Pemerintah, perinciannya:

- 7 (Tujuh) RUU telah memasuki Pembicaraan Tingkat 1;

- 9 (Sembilan) RUU sedang disiapkan Pemerintah, sekarang ini sudah di tangan Presiden, tetapi belum diserahkan ke DPR melalui Surat Presiden.
- 18 (Delapan Belas) RUU sedang dalam proses harmonisasi di Kemenkumham, penyusunan naskah akademik, dan penyempurnaan draft RUU.

Kita cukup prihatin kalau mencermati pelaksanaan fungsi perundang-undangan sampai saat ini. Tidak optimalnya pelaksanaan fungsi ini, telah menjadi tolok ukur bagi masyarakat untuk menilai terhadap kinerja DPR hasil Pemilu 2009. Melihat kenyataan ini, Pimpinan Dewan yang bertugas mengkoordinasi dan mensinergikan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dewan, telah melakukan pertemuan, baik dengan fraksi-fraksi maupun dengan Badan Legislasi DPR. Memang banyak kendala yang dihadapi bagi optimalisasi pelaksanaan fungsi ini, tetapi kita harus mencari pemecahan dan mencari solusi. Berbagai solusi akan ditempuh, antara lain melalui:

- perubahan perencanaan skema pembahasan fungsi legislasi di DPR;
- perubahan penjadwalan kegiatan rapat-rapat dewan;
- Ditentukan ada dua hari dalam seminggu khusus diagendakan untuk pelaksanaan fungsi perundang-undangan baik di Komisi, Pansus atau Baleg;
- mentaati aturan Tata Tertib DPR-RI pasal 141 ayat (1) yang menentukan bahwa pembahasan suatu RUU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) kali Masa Sidang. Demikian pula, penyusunan RUU termasuk Naskah Akademik harus dilakukan dalam 2 (dua) kali Masa Sidang. Ini kiranya berlaku pula bagi Pemerintah yang akan menyiapkan 1 (satu) draf RUU;
- mengefektifkan kerjasama dengan kalangan akademisi/perguruan-perguruan tinggi yang memenuhi standar kualifikasi untuk membantu Dewan dalam pelaksanaan fungsi ini;
- mengoptimalkan tenaga-tenaga ahli yang ada di Baleg, Komisi, maupun P3DI untuk fokus kepada pelaksanaan fungsi perundang-undangan;

Terobosan-terobosan ini diharapkan akan dapat meningkatkan fungsi perundang-undangan DPR. Oleh karena itu, kepada anggota Dewan, kepada pimpinan fraksi-fraksi Dewan, pimpinan Dewan mengharapkan untuk memberikan atensi terhadap fungsi perundang-undangan yang banyak mendapat sorotan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Sidang Dewan yang terhormat,

UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD mengatur bahwa arah kebijakan pelaksanaan program anggaran DPR-RI ditujukan bagi peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi anggaran untuk mencapai tujuan bernegara, dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mampu menjawab kebutuhan, keadilan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, perlu optimalisasi tata laksana atau mekanisme kerja fungsi anggaran berikut optimalisasi sistem dan unsur pendukungnya.

RUU APBN-P tahun 2010 telah dibahas oleh DPR dalam waktu satu bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (4) UU No. 27 tahun 2009. Berbagai hal yang berkaitan dengan pembahasan RUU APBN-P telah diselesaikan dengan tuntas. Dalam pembahasan RUU ini, telah disepakati asumsi dasar tahun 2010 yang terdiri dari beberapa indikator, di antaranya: pertumbuhan ekonomi 5,8%, inflasi 5,3%, tingkat suku bunga SBI 6,5%, lifting minyak 965 ribu barel/hari, dan nilai tukar rupiah Rp. 9.200.

Untuk Masa Sidang IV yang akan datang, Dewan segera mempersiapkan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2011. Pada pembukaan Masa Sidang I bulan Agustus yang akan datang, Presiden akan mengajukan RUU tentang APBN 2011 disertai nota keuangannya di dalam forum Rapat Paripurna DPR.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam melaksanakan hal-hal yang ditentukan oleh Peraturan perundang-Undangan, DPR-RI telah menetapkan beberapa pejabat publik. Pada Masa Sidang yang berjalan ini, telah ditetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK-RI tahun 2009; penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat masa jabatan tahun 2010-2013; dan persetujuan atas pencalonan Deputi Gubernur Bank Indonesia.

DPR juga telah menerima surat dari Presiden tertanggal 31 Mei 2010 tentang pencalonan Sdr. Darmin Nasution untuk menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia. Pencalonan ini sedang dalam proses sesuai dengan mekanisme Dewan.

Dewan juga telah memberi rekomendasi atas sepuluh pencalonan para Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara-negara sahabat untuk Republik Indonesia, dan pencalonan 23 (dua puluh tiga) Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Tim-tim yang telah dibentuk DPR dan telah bekerja efektif yaitu Tim Pengawas Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Angket DPR-RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century; Tim Pengawas Bencana Alam DPR-RI; Tim Pemantau UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Komisi-Komisi Dewan telah melakukan pembahasan mendalam atas berbagai permasalahan yang berkembang, baik berkaitan dengan bidang Politik dan Keamanan, Hukum, Ekonomi, dan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Komisi I DPR-RI telah melakukan pembahasan atas mulai berlakunya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Amanat UU tersebut, maka DPR-RI telah menyiapkan aturan pelaksanaannya. Untuk itu, DPR telah menyiapkan peraturan DPR-RI tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR-RI. Peraturan DPR ini dimaksudkan sebagai respon atas tuntutan UU No. 14 Tahun 2008, bahwa setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

DPR-RI sebagai badan publik, wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, yang meliputi informasi berkaitan dengan lembaga DPR yakni organisasi kedewanan dan kesekjenan, kegiatan dan kinerja lembaga DPR dan kesekjenan, laporan keuangan DPR dan Setjen DPR yang sudah diaudit, dan informasi lain yang diatur oleh UU. Sedangkan informasi yang wajib tersedia setiap saat, antara lain adalah daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, hasil keputusan DPR dan pertimbangannya, dan seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.

Dalam Peraturan DPR ini juga diatur beberapa informasi publik yang dikecualikan, antara lain informasi publik dari hasil rapat-rapat di DPR yang bersifat tertutup yang dinyatakan rahasia, surat DPR yang bersifat rahasia, surat atau dokumen DPR yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan.

Dalam rangka pembangunan demokrasi, agenda politik yang sedang dan akan berjalan di beberapa daerah melalui Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) menjadi perhatian Dewan. Berubahnya sistem pemilihan kepala daerah langsung, dari sistem perwakilan yang dilakukan sebelumnya, dirasakan telah turut menentukan tingkat

demokratisasi di daerah. Pada tahun 2010 ini, ada tujuh provinsi dan 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) kabupaten/kota yang telah dan akan menyelenggarakan Pemilukada. Ada beberapa provinsi dan kabupaten/kota dapat menyelenggarakan Pemilukada dengan aman dan tidak menimbulkan resistensi masyarakat, meskipun di beberapa daerah ada kendala, termasuk dalam hal pendanaan.

Komisi II DPR berpendapat bahwa masih banyak persoalan-persoalan prinsip yang terjadi, antara lain, netralitas aparatur pemerintahan, adanya data pemilih ganda, perbedaan tafsir persyaratan pencalonan, dan persoalan-persoalan teknis lainnya.

Paradoks demokrasi sering kali terlihat pada pelaksanaan Pemilukada, yakni fenomena terjadinya konflik politik di seputar pelaksanaannya. Konflik politik yang mengiringi pelaksanaan Pemilukada banyak ditemui di daerah-daerah, walaupun eskalasi konfliknya berbeda-beda. Kita mencatat kerusuhan menjelang Pemilukada di Mojokerto Jawa Timur, dan baru-baru ini kerusuhan yang terjadi pada saat rekapitulasi dan penghitungan suara di Bima, Nusa Tenggara Barat. Berbagai kerusuhan tersebut amat memprihatinkan kita dan harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, KPU, dan PKUD. Kalangan Dewan berpendapat, perlu investigasi yang menyeluruh atas kasus ini, jika ada unsur pelanggaran dari KPU di daerah, KPU Pusat harus memberikan sanksi dan dapat membekukan KPUD setempat. Hendaknya kerusuhan semacam ini tidak terulang lagi agar demokrasi yang berproses tidak tercederai.

Ke depan, Pemilukada yang menggambarkan proses demokrasi harus menunjukkan kualitas yang meningkat, harus berakhir sukses tanpa mengganggu nilai-nilai kesatuan dan persatuan bangsa, tidak diwarnai politik uang. Selain itu, penyelenggaraan Pemilukada jangan sampai menyuburkan praktek *oligarkhi* kekuasaan dengan munculnya calon yang merupakan kerabat *incumbent*. Juga telah terjadi praktek mensiasati pencalonan pilkada, seorang kepala daerah yang sudah dua kali menjabat mencalonkan diri sebagai calon wakil kepala daerah.

Anggota Dewan yang terhormat,

Dalam hal penegakan hukum, DPR-RI telah melakukan rapat-rapat secara intens dengan aparat penegak hukum. Dalam Rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung (MA), DPR mempertanyakan mengenai aspek manajemen penanganan perkara, data perkembangan putusan *in kracht* yang tidak dapat dieksposisi dan perkembangan kinerja Hakim Agung, serta eksistensi pengadilan pajak.

Dengan Kepolisian RI, DPR-RI mempertanyakan mengenai tindak lanjut rekomendasi dan kesimpulan Paripurna DPR tentang Kasus Bank Century. Komisi Dewan juga mendesak Kapolri untuk mengusut jaringan mafia hukum, mafia perpajakan di seluruh Indonesia hingga ke akar-akarnya, termasuk terhadap oknum pejabat dan mantan pejabat yang terlibat.

Dengan Menteri Hukum dan HAM, Dewan meminta agar dapat ditingkatkan fungsi *law center*, melakukan penanganan imigran ilegal dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi.

Dengan Kejaksaan Agung, dewan juga meminta agar lembaga ini mengoptimalkan efektifitas penanganan kasus-kasus korupsi yang besar (*big fish*) guna menyelamatkan aset dan keuangan negara.

Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terungkap keinginan untuk merekonstruksi semua hal yang berkaitan dengan tugas-tugas KPK yang sekarang ini sangat mendapat perhatian masyarakat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Di bidang ekonomi, DPR bersama Pemerintah sepakat agar pertumbuhan ekonomi harus diikuti peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. DPR meminta Pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah terutama daerah yang memiliki pertumbuhan rendah seperti Sulawesi, Kalimantan, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, daerah perbatasan, dan daerah terpencil.

Dewan juga telah memberi respon dengan baik, pergantian menteri keuangan dari Saudara Sri Mulyani Indrawati kepada Saudara Agus Martowardojo. Kalangan Dewan berharap, Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan berkemampuan menangani kebijakan fiskal, moneter, melanjutkan reformasi pajak, bea cukai, birokrasi di kementeriannya, meningkatkan akuntabilitas keuangan negara dan memiliki integritas dan kapabilitas. Perlu dibangun kerjasama yang baik antara jajaran Kementerian Keuangan dengan DPR sebagai mitra kerja, agar tugas-tugas kedua pihak dapat berjalan tanpa kendala apapun untuk melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Menteri Keuangan yang baru, juga diminta untuk dapat mempersiapkan diri dalam penyusunan RUU APBN 2011 dan nota keuangan dengan sebaik-baiknya, yang akan mulai dibahas bulan Agustus mendatang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Tindak lanjut kebijakan Presiden RI tentang moratorium kawasan hutan gambut, menjadi perhatian Komisi IV dalam rapat kerja dengan Pemerintah baru-baru ini. Dalam rapat kerja, juga dipertanyakan masalah hutan di tapal batas negara di perbatasan Kalimantan-Serawak yang rawan *illegal logging* dan perambahan kawasan hutan oleh pihak Malaysia. Masalah lain yang juga dipertanyakan adalah rencana merger tiga BUMN Perikanan, yaitu PT. Perikanan Samudera, Perum Sarana Pelabuhan Samudera, dan PT. Garam, untuk dapat meningkatkan efektifitas dan produktivitas perusahaan tersebut.

Adanya keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap 9 (sembilan) maskapai penerbangan Indonesia karena adanya dugaan pelanggaran terhadap pasal (5) dan pasal (21) UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi V meminta KPPU mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Keputusan KPPU ini perlu dikaji lebih lanjut, guna menjaga kepentingan yang lebih besar, menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan peran transportasi di Indonesia.

Dalam Rapat Gabungan Komisi DPR dengan Pemerintah yang membahas evaluasi terhadap renegotiasi CAFTA (*China-Asean Free Trade Agreement*), diperoleh kesimpulan bahwa, Komisi VI DPR-RI meminta Pemerintah untuk membuat program aksi peningkatan daya saing industri dan usaha mikro, kecil dan menengah; pengamanan pasar dalam negeri; dan penguatan daya saing ekspor. Infrastruktur logistik juga perlu diperkuat, demikian juga dengan gas bumi, agar produk Indonesia mampu bersaing dalam menghadapi komitmen *free trade agreement* yang telah disepakati. Komisi Dewan juga meminta Pemerintah untuk melakukan implementasi program aksi kebijakan investasi dan perdagangan bidang barang dan jasa.

Dalam hal permasalahan industri pupuk, Komisi VI meminta agar BUMN pupuk secara terus-menerus melakukan revitalisasi, restrukturisasi, dan profitisasi dalam upaya menjadikan BUMN pupuk ke arah penguatan perusahaan, baik dalam bentuk *holding company* maupun bentuk-bentuk sinergitas lainnya.

Ada beberapa permasalahan menonjol dalam pembahasan yang telah dilakukan Komisi VII DPR dengan pemerintah, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Gabungan, antara lain masalah kelistrikan, upaya mengatasi pasokan gas untuk industri dalam negeri, dan upaya pengurangan disparitas harga gas domestik di pasar internasional.

Dalam hal kelistrikan, Komisi VII sepakat dengan usulan pemerintah untuk melaksanakan distribusi subsidi listrik sesuai UU No. 2 tahun 2010 tentang APBN-P 2010 sebesar Rp. 55,1 triliun, dengan sistematika yang berkeadilan dan tidak memberatkan rakyat kecil, dan tetap menjaga daya saing industri dimana pelanggan dengan daya 450 VA (volt ampere) dan 900 VA (volt ampere) tidak mengalami kenaikan. Dalam hal kelistrikan ini, komisi juga meminta PLN untuk melakukan optimalisasi bauran energi dengan mengganti pembangkit BBM dengan pembangkit gas, tenaga air dan panas bumi.

Dalam upaya mengatasi kelangkaan pasokan gas untuk industri dalam negeri, DPR mendesak Pemerintah untuk segera membuat rencana aksi langkah-langkah kebijakan prioritas. Antara lain, melalui percepatan realisasi investasi Migas, lapangan-lapangan gas baru, serta renegotiasi kontrak penjualan gas ke luar negeri, percepatan produksi lapangan gas baru dan pengembangan *Coal Bed Methane (CBM)*. Dewan juga sepakat dengan Pemerintah untuk segera melakukan revisi terhadap UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana yang telah diamanatkan Panitia Khusus BBM DPR.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada saat ini, Komisi IX sedang mempersiapkan RUU tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang akan menjadi dasar terhadap penyelenggaraan 5 (lima) Program Jaminan Sosial dengan prioritas pendahuluan adalah berlakunya Program Jaminan Kesehatan Semesta untuk Seluruh Rakyat Indonesia.

Masalah ketenagakerjaan, juga cukup menjadi perhatian bagi Komisi Dewan. Banyaknya pengaduan mengenai masalah ketenagakerjaan, terutama berkaitan dengan pemecatan sepihak, gaji yang tidak wajar, pesangon yang tidak kunjung keluar dan beberapa masalah lain, telah mendapatkan bahasan. Permasalahan ketenagakerjaan yang paling menonjol adalah yang terjadi di PT Drydock World Graha Batam, yang menyebabkan terjadinya kerusuhan pada tanggal 22 April 2010.

Ada hal yang cukup menggembirakan mengenai masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, yaitu hasil kunjungan kepala negara baru-baru ini di Malaysia. Dalam kunjungan kenegaraan ini telah dibahas masalah TKI di Malaysia, yang dituangkan di dalam *letter of intents (LoI)* yang ditandatangani oleh Menakertrans Indonesia dan Mendagri Malaysia di hadapan Presiden RI dan Perdana Menteri Malaysia. *Letter of Intents* ini merupakan penyempurnaan dari *Memorandum of Understanding (MoU)* yang telah

ditandatangani di Bali tahun 2006. Indonesia dan Malaysia sepakat memperbaiki aturan dan penempatan serta perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia.

Masalah Ujian Nasional (UN) kembali menyita perhatian kita, dengan banyaknya siswa yang gagal serta banyaknya sekolah yang tingkat kelulusannya nol persen (0%). Lebih ironis lagi, setelah dilakukan UN ulangan, ternyata masih banyak siswa yang tidak lulus. Oleh karena itu, Dewan mengimbau kepada Pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan UN, demi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Standar Nasional memang perlu, namun sangat tidak bijak jika memaksakan standar tersebut untuk semua siswa dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi dalam waktu yang bersamaan.

Masalah penghapusan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) juga tak luput dari perhatian kita. Dihapuskannya Dirjen PMPTK ini, menimbulkan persoalan baru. Dewan meminta Pemerintah mendengarkan aspirasi para pihak terkait, para guru. Bagaimanapun, mutu pendidikan akan terkait dengan para pendidikanya. Untuk itu diperlukan institusi/lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menilai kualitas kedua unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi yang sebaik-baiknya.

Persiapan *Sea Games* 2011 juga tidak luput dari perhatian Dewan. Peningkatan prestasi para atlet pada *Sea Games* 2011 harus menjadi target utama bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan pemangku kepentingan di bidang olahraga. Di samping itu, karena Indonesia akan menjadi tuan rumah pesta olahraga se-Asia Tenggara tersebut, maka penyelenggaraannya harus dipersiapkan sebaik-baiknya untuk mengangkat citra Indonesia di mata internasional. Perlu persiapan yang optimal bagi penyelenggaraan pesta olahraga tersebut.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masalah penting lain yang menjadi sorotan Dewan selama ini adalah BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional). Perlu dilakukan reorganisasi BKKBN dalam rangka implementasi Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Reorganisasi BKKBN sangat diperlukan untuk suksesnya program KB. Perlu diperhatikan bahwa jumlah penduduk Indonesia sekarang ini telah mencapai sekitar 240 juta jiwa.

Sensus penduduk yang berlangsung dari tanggal 1 Mei hingga 15 Juni 2010 juga tak luput dari sorotan kita. Dewan memandang, penyelenggaraan Sensus tersebut belum optimal. Meskipun telah menghabiskan dana sekitar Rp. 3,34 triliun, banyak warga yang merasa belum didatangi oleh petugas pencacah jiwa. Hal ini menjadi kendala dalam analisis data kependudukan.

Masalah penyelenggaraan ibadah haji tidak luput dari perhatian Dewan. Sungguh memprihatinkan kualitas penyelenggaraan haji yang selama ini belum mampu memuaskan jamaah, sebagaimana terlihat dari biaya ibadah haji, belum efektif dan efisiennya pelayanan ibadah haji, pengelolaan anggaran, dan lain-lain. Pimpinan Dewan mengharapkan, Komisi terkait dapat melakukan bahasan dengan Kementerian Agama, agar penyelenggaraan haji tahun ini dan tahun-tahun ke depan menjadi lebih baik.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam masa sidang ini, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) telah melakukan kegiatan yang intensitasnya cukup tinggi, salah satunya adalah penyusunan, pembahasan, dan penyelesaian RENSTRA DPR-RI tahun 2010-2014. RENSTRA DPR-RI disusun untuk menjadi pedoman perencanaan tahunan DPR 2009-2014 dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional, khususnya dalam rangka penguatan DPR-RI sebagai lembaga perwakilan kredibel pada masa depan. Dengan adanya RENSTRA, seluruh perencanaan pembangunan, baik kelembagaan, anggaran, maupun sarana dan prasarana menjadi terdokumentasi dengan lengkap, sehingga menjadi jelas arah pembangunan lembaga perwakilan ini.

BURT juga melakukan bahasan terhadap rencana pembentukan Rumah Aspirasi, penyusunan pedoman kehumasan, penyusunan pedoman pengaduan masyarakat, membahas program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota DPR beserta keluarganya untuk tahun 2010. BURT juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan kinerja Sekretariat Jenderal dalam bentuk Pedoman Mekanisme Pengawasan BURT.

Badan Kehormatan DPR-RI, melakukan kegiatan antara lain penjadwalan pembahasan revisi Kode Etik dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPR-RI. Badan Kehormatan juga telah meminta keterangan kepada para pengadu terkait dengan pengaduan terhadap 3 (tiga) anggota DPR-RI yang terkena masalah hukum.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI telah melakukan berbagai kegiatan, khususnya rapat-rapat intern untuk mendiskusikan dan merumuskan temuan-temuan yang strategis. BAKN telah menyiapkan bahan-bahan yang terkait dengan kunjungan kerja, pembahasan APBN, serta persiapan penelaahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2009.

Sidang Dewan yang terhormat,

Di bidang internasional, Dewan, Pemerintah dan masyarakat Indonesia mengutuk dan mengecam keras atas tindakan Israel menyerang armada kapal pembawa bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Jalur Gaza. Dunia internasional, Pemerintah dan masyarakat Indonesia memastikan Israel bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Masyarakat internasional mendesak dilakukannya penyelidikan atas serangan berdarah Israel terhadap misi kemanusiaan Gaza. Investigasi independen, kredibel dan tidak memihak harus dilakukan.

Dalam masalah Palestina, posisi Indonesia sangat jelas, memberikan dukungan penuh bagi Negara Palestina yang merdeka. Pendudukan Israel atas wilayah Palestina merupakan sumber permasalahan di Timur Tengah. Blokade terhadap Gaza telah menimbulkan kesengsaraan bagi warga Palestina, karena itu harus dihentikan.

Dewan mendukung Pemerintah untuk berperan aktif menjadi bagian dari proses perdamaian sesuai peran yang tepat dan adil bagi rakyat Palestina. DPR-RI sebagai anggota dan duduk sebagai *Vice President PUIC (Parliamentary Union of the OIC Member States)*, dalam pertemuan regulernya akan mendorong organisasi ini untuk bersama-sama menghentikan upaya teror Israel terhadap rakyat Palestina.

Dewan juga menganggap penting untuk mendukung perlindungan Masjid Al Aqsa, tempat warisan budaya di Al Quds Al Sharif, dan menghimbau pada UNESCO untuk mengambil langkah melindungi tempat bersejarah tersebut.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam rangka membangun dan meningkatkan hubungan kerjasama di dunia internasional, Dewan telah melakukan diplomasi parlemen dengan membentuk Group Kerjasama Bilateral DPR-RI dengan 59 (lima puluh sembilan) negara sahabat. Kami berharap, dengan terbentuknya Grup Kerjasama Bilateral ini, tercipta kerjasama yang

lebih baik lagi dan saling menguntungkan dengan para negara sahabat demi kemajuan kedua bangsa dan negara.

Masih dalam upaya melaksanakan diplomasi parlemen, Dewan telah mengirimkan delegasi ke *Asian Parliamentary Assembly Standing Committee on Political Affairs (APA Standing Committee)* di Iran baru-baru ini. DPR-RI telah pula mengirim delegasi dipimpin oleh Ketua DPR-RI ke Turki pada akhir bulan Mei, dan ke Iran pada awal Juni. Kunjungan delegasi ke Turki dalam rangka penandatanganan *MoU* antara Ketua DPR-RI dan Ketua *Grand National Assembly* (Parlemen Turki) mengenai peningkatan hubungan bilateral dan peningkatan kerja sama Indonesia-Turki. Selain itu, delegasi juga membawa misi sebagai Presiden APA 2008-2010 dan Vice President PUIC 2010-2012, untuk mengadakan *APA Troika Meeting* di Teheran, membahas masalah konflik Israel-Palestina.

Dewan terus mendukung upaya aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, mendukung upaya diplomasi internasional Pemerintah dalam perlucutan senjata nuklir, dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Pemerintah perlu terus konsisten dalam memperjuangkan inisiatif tersebut, demi tercapainya perdamaian dunia dan stabilitas kawasan regional. Dewan mendorong pemerintah untuk melakukan pembukaan perwakilan Indonesia di negara-negara yang potensial bekerjasama bagi kepentingan Indonesia. Optimalisasi peningkatan kerjasama strategis dengan berbagai negara sahabat adalah hal yang penting.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah beberapa hal yang perlu saya kemukakan, khususnya berkaitan dengan kegiatan alat-alat kelengkapan Dewan dalam mengemban 3 (tiga) fungsi utamanya pada Masa Sidang III ini. Fungsi-fungsi Dewan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh motivasi kerja dan kinerja yang optimal oleh seluruh anggotanya, sarana prasarana, *supporting system* yang handal dan profesional.

Tidak kalah penting adalah peningkatan disiplin para anggota Dewan dalam menghadiri rapat-rapat Dewan, mengingat besarnya harapan rakyat terhadap peningkatan kualitas kinerja Dewan dalam proses pembangunan demokrasi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan lembaga perwakilan yang memiliki integritas tinggi, kredibel dan produktif, maka akan tercipta kekuatan penyeimbang bagi lembaga eksekutif. Melalui para pimpinan fraksi, hal ini kami mintakan perhatian agar tekad kita menjadi wakil rakyat terpercaya, benar-benar dapat terwujud dan citra DPR dapat terangkat.

Besok pagi, Dewan akan segera memasuki masa reses. Pimpinan berharap para Anggota Dewan dapat memanfaatkan masa reses dengan menyerap aspirasi dan mendengar berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Atas segala perhatian saudara-saudara, kami mengucapkan teima kasih.

***Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.***

KETOK 3 X

Jakarta, 18 Juni 2010

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. MARZUKI ALIE

LAMPIRAN PIDATO KETUA DPR RI PADA RAPAT PARIPURNA PENUTUPAN MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2009-2010

Daftar negara-negara asal pencalonan sepuluh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Republik Indonesia yang telah dibahas oleh DPR, yaitu:

1. Republik Finlandia;
2. Republik Ghana;
3. Republik Zambia;
4. Persemakmuran Bahamas;
5. Republik Islam Iran;
6. Republik Kyrgyzstan;
7. Republik Makedonia;
8. Republik Irak;
9. Kerajaan Belanda; dan
10. Kerajaan Lesotho.

Daftar negara-negara sahabat tujuan pencalonan 23 (dua puluh tiga) Duta Besar LBBP RI yang telah dibahas DPR RI yaitu:

1. Republik Perancis, merangkap Kepangeranan Monaco dan Kepangeranan Andorra;
2. Kerajaan Belgia, merangkap Keharyapatihan Luxemburg dan Uni Eropa;
3. Republik Hungaria, merangkap Republik Macedonia
4. Republik Polandia;
5. Republik Ceko;
6. Republik Serbia;
7. Republik Turki;
8. Republik Demokratik Federal Ethiopia, merangkap Republik Demokrasi Somalia dan Republik Djibouti;
9. Republik Sudan, merangkap Republik Eritrea;
10. Republik Suriname, merangkap Republik Guyana;
11. Amerika Serikat;
12. Perwakilan Tetap Republik Indonesia di PBB;
13. Republik Mexico, merangkap republic Costa Rica, Republik Honduras, Republik Guatemala, dan Republik Nikaragua;
14. Republik Federal Brazil;
15. Republik Argentina, merangkap Republik Paraguay dan Republik Uruguay;
16. Republik Chile;
17. Republik Lebanon;
18. Republik Arab Suriah;
19. Negara Kuwait;
20. Republik Rakyat Demokratik Korea;
21. Jepang;
22. Papua Nugini, merangkap Kepulauan Solomon; dan
23. Selandia Baru, merangkap Kerajaan Tonga dan Samoa.

DAFTAR NAMA GRUP KERJA SAMA BILATERAL (GKSB) DPR RI PERIODE 2009—2014

1. GKSB DPR RI—Parlemen Afrika Selatan
2. GKSB DPR RI—Parlemen Arab Saudi
3. GKSB DPR RI—Parlemen Australia
4. GKSB DPR RI—Parlemen Azerbaijan
5. GKSB DPR RI—Parlemen Albania
6. GKSB DPR RI—Parlemen Aljazair

7. GKSBR DPR RI—Parlemen Bangladesh
8. GKSBR DPR RI—Parlemen Belgia
9. GKSBR DPR RI—Parlemen Bulgaria
10. GKSBR DPR RI—Parlemen Brazil
11. GKSBR DPR RI—Parlemen Ceko
12. GKSBR DPR RI—Parlemen Chile
13. GKSBR DPR RI—Parlemen China
14. GKSBR DPR RI—Parlemen Estonia
15. GKSBR DPR RI—Parlemen Finlandia
16. GKSBR DPR RI—Parlemen Hongaria
17. GKSBR DPR RI—Parlemen Inggris
18. GKSBR DPR RI—Parlemen Irak
19. GKSBR DPR RI—Parlemen Iran
20. GKSBR DPR RI—Parlemen Italia
21. GKSBR DPR RI—Parlemen Irlandia
22. GKSBR DPR RI—Parlemen India
23. GKSBR DPR RI—Parlemen Jepang
24. GKSBR DPR RI—Parlemen Jerman
25. GKSBR DPR RI—Parlemen Republik Korea
26. GKSBR DPR RI—Parlemen Republik Rakyat Demokratik Korea
27. GKSBR DPR RI—Parlemen Kyrgyzstan
28. GKSBR DPR RI—Parlemen Kuba
29. GKSBR DPR RI—Parlemen Kanada
30. GKSBR DPR RI—Parlemen Kuwait
31. GKSBR DPR RI—Parlemen Lebanon
32. GKSBR DPR RI—Parlemen Libya
33. GKSBR DPR RI—Parlemen Meksiko
34. GKSBR DPR RI—Parlemen Macedonia
35. GKSBR DPR RI—Parlemen Mesir
36. GKSBR DPR RI—Parlemen Mongolia
37. GKSBR DPR RI—Parlemen Maroko
38. GKSBR DPR RI—Parlemen Perancis
39. GKSBR DPR RI—Parlemen Peru
40. GKSBR DPR RI—Parlemen Papua Nugini
41. GKSBR DPR RI—Parlemen Polandia
42. GKSBR DPR RI—Parlemen Portugal
43. GKSBR DPR RI—Parlemen Palestina
44. GKSBR DPR RI—Parlemen Pakistan
45. GKSBR DPR RI—Parlemen Qatar
46. GKSBR DPR RI—Parlemen Rumania
47. GKSBR DPR RI—Parlemen Rusia
48. GKSBR DPR RI—Parlemen Selandia Baru
49. GKSBR DPR RI—Parlemen Serbia
50. GKSBR DPR RI—Parlemen Slowakia
51. GKSBR DPR RI—Parlemen Suriah
52. GKSBR DPR RI—Parlemen Tunisia
53. GKSBR DPR RI—Parlemen Sudan
54. GKSBR DPR RI—Parlemen Spanyol
55. GKSBR DPR RI—Parlemen Turki
56. GKSBR DPR RI—Parlemen Tajikistan
57. GKSBR DPR RI—Parlemen Uni Emirat Arab
58. GKSBR DPR RI—Parlemen Venezuela
59. GKSBR DPR RI—Parlemen Yordania